



Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2019
Kota Bengkulu Berhasil Pertahankan WTP

Bengkulu – Humas BPK

Pemerintah Kota Bengkulu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian Pemerintah Kota Bengkulu berhasil mempertahankan opini WTP yang telah didapat tahun lalu.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Andri Yogama menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Bengkulu TA 2019 tersebut kepada Ketua DPRD Kota Bengkulu, Suprianto, dan Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Rabu, 24 Juni 2020.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, maka BPK memberikan opini atas LKPD Pemerintah Kota Bengkulu TA 2019 dengan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)”, jelas Andri Yogama.

Meskipun berhasil meraih opini WTP, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu masih menemukan beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bengkulu yaitu terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan Pemda terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan terkait sistem pengendalian intern yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Masih Belum Optimal Dalam Mendukung Penyajian Laporan Keuangan, Penyajian dan Penatausahaan Aset Lain-lain Belum Dilakukan Secara Memadai, dan Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Pajak Pusat atas Kegiatan Belanja Belum Memadai.

Adapun temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultan, Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan, dan Kelebihan Pembayaran atas Tiga Paket Pekerjaan.

Dalam pidatonya, Kepala Perwakilan menyampaikan Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Menutup sambutannya, Kepala Perwakilan meminta kepada Walikota dan jajarannya untuk wajib menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan juga menyinggung penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Berdasarkan data di BPK, sampai dengan Semester II TA 2019 persentase penyelesaian tindak lanjut Pemerintah Kota Bengkulu mencapai 72,83% atau nomor lima dari 11 Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Bengkulu. Untuk itu Kepala Perwakilan meminta supaya Kepala Daerah untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan kepada DPRD untuk terus mendorong upaya percepatan tindak lanjut.

“BPK berharap agar LKPD yang telah diaudit ini, tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”, tutup Kepala Perwakilan mengakhiri sambutannya. (***/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Contact Person:

Rony Setyo Kurniawan
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu